



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MALANG
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUKRISTYONO APRIYODARMO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 823814

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 628.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/21 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 156.000.000
2. Tanah Seluas 87 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 115.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/55 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 142.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 118.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11BF1CBA/T SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOTOR, VESPA P150X Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOTOR, HONDA H1BO2N42LO A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 24.349.637



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	770.349.637
III. HUTANG	Rp.	225.964.855
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	544.384.782

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.